

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi sangat penting dalam meningkatkan mobilitas warga, baik dari kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan barang dan jasa, selain itu transportasi juga memiliki peranan penting bagi penunjang dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi tetapi belum berkembang sebagai upaya peningkatan pemerataan pembangunan (Kartini, 2007) & (Sutedi, 2011). Oleh karena itu, timbul tuntutan untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi agar pergerakan manusia dapat berlangsung secara aman, nyaman, teratur, dan lancar serta efisien dari segi waktu maupun biaya. Salah satu solusinya adalah menyediakan jalur transportasi darat yang mempunyai efisiensi tinggi terutama dalam hal kecepatan, biaya yang murah dan dapat mengangkut dalam jumlah banyak. Dalam hal ini penyediaan transportasi umum merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah karena menyangkut harkat hidup orang banyak. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi menjadi hal yang harus terpenuhi demi tercapainya segala aktivitas dengan efektif dan efisien yang dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Masalah transportasi seringkali menjadi masalah yang umum terjadi di masyarakat yang mana tidak hanya menyangkut mengenai prasarana jalan raya secara fisik akan tetapi masalah yang paling besar adalah mengenai pengaturan lalu lintas transportasi itu sendiri karena apabila lalu lintas tersebut berjalan lancar maka akan timbul kemudahan dalam berlalu lintas dalam daerah tersebut. Sistem

transportasi haruslah dikembangkan dengan baik demi mewujudkan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan dalam berlalu lintas serta dapat mendukung perkembangan kemajuan ekonomi daerah itu sendiri. Sistem transportasi merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bidang perhubungan.

Dinas Perhubungan selaku unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan pelayanan dibidang perhubungan yang mana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan daerah. Dinas Perhubungan selaku penyelenggara dan pengelola tata perhubungan mempunyai peran yang sangat penting dalam keberlangsungan sistem transportasi. Dinas perhubungan perlu membangun dan menyelenggarakan terminal sebagai prasarana mendukung adanya kegiatan transportasi perhubungan darat. Dalam konteks ini Dinas Perhubungan memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah. Adapun fungsi dari Dinas Perhubungan atau biasa disingkat DISHUB adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. Untuk wewenang, Dinas Perhubungan memiliki wewenang untuk memberikan izin persuratan terkait transportasi dan perhubungan seperti urus izin usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, izin angkutan barang, penertiban izin trayek dan kartu pengawasan angkutan penumpang umum, Izin trayek angkutan antar jemput,

izin operasi angkutan sewa, izin operasi angkutan pariwisata, Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT), Izin Operasi (SPIO) Angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan yang lainnya.

Perkembangan pembangunan dalam bidang transportasi dikawasan Timur Indonesia khususnya Nusa Tenggara Timur telah menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Adanya peningkatan perkembangan ini, dampaknya sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga berpengaruh pada arus pergerakan barang, jasa dan manusia sehingga dituntutlah suatu penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Kabupaten Manggarai dengan Ibu kotanya Ruteng adalah salah satunya Kabupaten ini memiliki potensi dasar penghasil komoditi pertanian, seperti: kopi, cengkeh, kemiri dan beras serta memberikan kontribusi pada pendapatan domestik regional bruto sebesar 51 persen (Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai, 2007). Dari sektor pertanian inilah yang akan mendorong daya mobilitas kegiatan masyarakat kota Ruteng dalam proses pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam bidang perekonomian sehingga pendapatan daerah tersebut meningkat. Dengan demikian, kondisi inilah yang akan mendorong masyarakat ingin melakukan pergerakannya ke kota Ruteng dengan mengfungsikan sarana transportasi kota dengan menggunakan moda angkutan umum. Tujuan utama dari pada pelayanan angkutan umum di Kota Ruteng adalah memberikan pelayanan yang aman, cepat, nyaman, dan murah pada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Manggarai harus menyediakan sarana dan prasarana transportasi jalan yang mendukung untuk digunakan oleh masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik.

Salah satunya adalah penyediaan terminal angkutan baik angkutan penumpang maupun angkutan barang.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Manggarai terbagi menjadi 10 Kecamatan, 132 Desa dan 17 Kelurahan dengan pusat pemerintahan di Kota Ruteng Kecamatan Langke Rembong. Jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai pada tahun 2011 mencapai sebanyak 484,015 jiwa dan 503.861 KK, dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 15.55 jiwa/kilometer persegi. Tahun 2016 jumlah penduduk berjumlah 674.984 jiwa. Tingginya jumlah penduduk dari tahun ke tahun karena adanya mobilitas di daerah lain yang ingin mengadu nasib di Kabupaten Manggarai. Meningkatnya jumlah penduduk di kota Ruteng berakibat pada tingginya jumlah kendaraan yang dimiliki masyarakat untuk dapat melakukan aktifitas sehari-sehari.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Data Kendaraan Terminal Mena Kabupaten Manggarai
Tahun 2021-2022

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
2.	Angkutan Antar Kota:	
	Bus	12
	Travel	20
2.	Angkutan Dalam Kota:	
	Bemo	25
	Ojek	15
3.	Angkutan Desa:	
	Oto Kol	10
	Jumlah	82

Sumber: (Data *Primer*:diolah 2022)

Dalam mendukung pelaksanaan angkutan jalan, Kabupaten Manggarai memiliki prasarana berupa terminal didalam Kota Ruteng dan sampai saat ini memiliki tiga unit terminal yakni Terminal Carep diruas jalan Ruteng-Borong

dengan tujuan melayani angkutan dari Kota Ruteng ke arah timur. Terminal Mena pada pinggiran ruas jalan Ruteng-Labuan Bajo melayani jalur kendaraan Ruteng ke arah barat serta Terminal Karot di sebelah utara melayani trayek angkutan umum dari Ruteng ke arah utara seperti Reo, Dampek sampai di Pota wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Salah satu jenis pendapatan asli daerah dari sektor retribusi yang cukup potensial di Kabupaten Manggarai adalah biaya retribusi terminal. Sebagai sentra aktivitas transportasi dan ekonomi, retribusi jasa usaha terminal diharapkan dapat berdampak positif terhadap penerimaan kas daerah. Berikut pendapatan daerah dari sektor retribusi terminal dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.2
Data Retribusi Terminal Mena Kota Ruteng Kabupaten Manggarai
Tahun 2021-2022

No	Jenis Retribusi	Jenis Kendaraan	Tarif Per-kendaraan
1.	Retribusi Terminal	1. Bus Antar Kota Antar Kabupaten	Rp. 20.000 (sekali masuk)
		2. Bus antar Kota Dalam Kota	Rp. 10.000 (Sekali masuk)
		3. Angkutan Kota/Angkutan Desa	Rp. 5000 (sekali masuk)
2.	Retribusi Parkir	1. Kendaraan bermotor roda dua	Rp. 2000
		2. Kendaraan Roda empat	Rp.5000
		Atau Lebih	Rp. 5000
3.	Retribusi Tempat Usaha	1. Pedagang Menetap	Rp.5000
		2. Pedagang tidak menetap	Rp. 2000

Sumber : (Data Primer:diolah 2022)

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Manggarai merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan data retribusi terminal yang

menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Dari tabel tersebut menjelaskan bahwa biaya retribusi terdiri dari tiga jenis yaitu retribusi terminal, retribusi parkir, serta retribusi tempat usaha. Retribusi terminal menjelaskan setiap kendaraan baik roda dua, roda empat ataupun lebih memiliki biaya masing-masing ketika masuk dalam terminal Mena. Kemudian, untuk biaya parkir dari masing-masing kendaraan roda dua sebesar Rp.2000 dan roda empat atau lebih sebesar Rp.5000. Selain itu, setiap usaha yang dijalankan disekitaran kompleks terminal dikenakan biaya retribusi dimana usaha yang tetap biaya retribusinya sebesar Rp.5000 dan usaha yang tidak menetap sebesar Rp.2000. Dengan demikian pendapatan daerah Kabupaten Manggarai dapat diperoleh dari biaya retribusi yang ditetapkan daerah sehingga menambah kas daerah.

Dalam penelitian mengenai Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai dalam pengelolaan terminal Mena baik itu dalam mengelola atau menghitung jumlah arus lalu lintas dan juga informasi keberangkatan dan kedatangan didalam terminal yang benar atau sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai. Tuntutan untuk setiap aktivitas yang dilakukan oleh para pegawai dalam menjalankan tugasnya dalam pengelolaan terminal atau pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai harus mampu sesuai dengan target organisasi dimana tugas diselesaikan sesuai dengan waktu yang diberikan. Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai dalam pengelolaan terminal Mena, harus mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi baik berupa dana didalam pengelolaan terminal Mena, teknologi untuk memperlancar kegiatan

operasional terminal Mena dan sebagiannya. Pegawai juga diharapkan mampu bekerja sendiri dan memiliki kemampuan yang dapat digunakan dalam menjalankan segala tugas yang diberikan.

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 20 Mei 2021, yang dilakukan oleh peneliti mengatakan fungsi terminal Mena masih kurang optimal. Dimana peneliti melihat berbagai permasalahan yang ditemukan dilapangan seperti pengelola, pengawas, penertiban yang belum optimal. Salah satu sumber dari media massa elektronik yaitu POS-KUPANG.com permasalahan yang terjadi ialah sarana dan prasarana yang sudah tidak layak. Dimana bangunan kantor yang sudah mulai rusak, dinding yang dipenuhi dengan coretan piloks, dan tidak adanya toilet umum dan lain sebagainya yang sudah tidak mendukung dalam penyelenggaraan penggunaan terminal. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kenyamanan dari para penumpang karena kondisi dari prasarana terminal yang kurang memuaskan untuk digunakan sebagai prasarana perhubungan. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Rudi, bapak Lorens, bapak Gani dan beberapa sopir angkutan lain mengatakan permasalahan yang sering menjadi kendala bagi para sopir angkutan umum antar desa adalah terminal bayangan. Terminal bayangan adalah terminal yang dibangun oleh oknum-oknum dari masyarakat biasa yang menimbulkan arus perpindahan penumpang tidak berjalan optimal. Disamping itu, salah satu sumber yaitu pegawai dinas perhubungan Kota Ruteng yaitu bapak Dan menegaskan dengan adanya terminal bayangan berimbas kepada realisasi pendapatan retribusi terminal yang mana setiap tahunnya tidak memenuhi dari target yang ditetapkan. Karena tidak

masuknya sopir angkot kedalam terminal maka pihak Dinas Perhubungan mensiasatinya dengan melakukan penarikan retribusi diluar terminal yakni dibahu jalan yang sudah ditentukan ini adalah salah satu penyimpangan yang dilakukan oleh pihak Dinas perhubungan. Dengan demikian, berhasil tidaknya kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai dapat dipengaruhi oleh tingkat kinerja secara individual maupun secara kelompok. Dengan asumsi semakin baik kinerja, maka kinerja organisasi akan semakin baik pula. Kinerja Menurut Bernardin dan Russel (dalam setiawan 2005) Kinerja adalah catatan tentang hasil yang diperoleh dari fungsi pekerjaan spesifik atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu, dalam definisi tersebut Benardin dan Russel menekankan pengertian kinerja sebagai hasil dari sebuah pekerjaan dan kontribusi mereka pada suatu organisasi. Definisi lain tentang Kinerja menurut Byars dan Rue dalam jurnal (2014) Kinerja adalah sebagai derajat pencapaian tugas yang diselesaikan karyawan dalam pekerjaannya. Untuk mengukur kinerja dari para pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai maka digunakan enam indikator menurut Bernardin dan Russel (2006) *Quality* (kualitas), *Quantity* (kuantitas), *Timelinnes* (ketepatan waktu), *Cost effectiveness* (efektivitas biaya), *Need for Supervision* (pengawasan), *Interpersonal impact* (dampak antar pribadi). Dengan menggunakan enam indikator ini diharapkan para pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai dapat bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan serta dapat meningkatkan kualitas kerjanya agar mencapai satu tujuan yang sama.

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Terminal Mena dengan judul :**“Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai dalam Pengelolaan Terminal Mena Kota Ruteng Kabupaten Manggarai”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diangkat, maka untuk mengetahui Kinerja Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan Terminal Mena kota Ruteng Kabupaten Manggarai, maka peneliti mengarahkan untuk mendapat jawaban dari perumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai dalam Pengelolaan Terminal Mena Kota Ruteng Kabupaten Manggarai?”

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami peran dari pihak Dinas Perhubungan terhadap pengelolaan Terminal Mena Kota Ruteng Kabupaten Manggarai.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan aktivitas kerja dari pihak Dinas Perhubungan terhadap pengelolaan Terminal Mena Kota Ruteng Kabupaten Manggarai.
3. Untuk mengidentifikasikan permasalahan kinerja dari Dinas Perhubungan terhadap pengelolaan Terminal Mena Kota Ruteng Kabupaten Manggarai.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu dalam konsentrasi Manajemen Publik.
2. Penelitian ini juga sebagai bahan perbandingan dari masyarakat mengenai kinerja dari pihak Dinas Perhubungan terhadap pengelolaan Terminal.

3. Sebagai bahan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa dalam mempelajari peranan dari suatu organisasi publik secara lebih mendalam mengenai tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Penelitian ini diharapkan mampu membangun dan menjadi bahan rekomendasi mengenai pelaksanaan kinerja dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai dalam pengelolaan Terminal Mena Kota Ruteng.